



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FITA SETIATI

2. Jabatan : KPS D3 AKUNTANSI PSDKU KEDIRI

3. NHK : 962096

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.960.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
 MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 500.000.000
- 4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 800.000.000
- 5. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA ,
 WARISAN Rp. 660.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

p.

108.500.000

- MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- 2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- 3. MOTOR, YAMAHA YUPITER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	8.000.000
D.	SURAT BERHARGA	KPIK	Rp.	KPIK KPIK
E.	KAS DAN SETARA KAS		Rp.	35.000.000
E.	HARTA LAINNYA	- 10K	Rp.	OK OH
	Sub Total		Rp.	5.111.500.000



4.411.500.000



III. HUTANG Rp. 700.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.